

ABSTRAK

Kejahatan siber telah menjadi isu global dalam beberapa tahun terakhir, dan *hacker* merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan siber. Banyak negara telah menerapkan berbagai sanksi pidana untuk melawan kejahatan siber, termasuk kerja sosial sebagai hukuman alternatif bagi *hacker*. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan alternatif sanksi pidana kerja sosial terhadap *hacker* di Indonesia, Singapura, dan Inggris. Penelitian akan berfokus pada menjawab permasalahan mengenai Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan sanksi pidana kerja sosial Terhadap *hacker* sebagai pelaku dalam kejahatan siber di Indonesia? dan Bagaimanakah model sanksi pidana kerja sosial yang ideal di masa mendatang terhadap *hacker* sebagai pelaku dalam kejahatan siber di Indonesia (dengan perbandingan di Singapura dan Inggris)? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis perbandingan dokumen hukum dan tinjauan literatur. Penelitian menemukan bahwa terdapat peluang diterapkannya pidana kerja sosial terhadap *hacker* di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaan meskipun belum adanya harmonisasi antara kedua pengaturan ini. Penelitian menunjukkan Indonesia, Singapura, dan Inggris mempunyai kerangka hukum dan praktik yang berbeda dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial. Penelitian menemukan bahwa pengaturan serta kebijakan pidana kerja sosial di Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengaturannya apabila dibandingkan dengan pidana kerja sosial yang ada di Singapura dan Inggris. Selain itu, terkait dengan sanksi pidana kerja sosial terhadap *hacker*, hal ini dapat dilaksanakan. Namun demikian perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sosial yang akan dilakukan demi terwujudnya tujuan pemidanaan. Selain itu, pengawasan pidana kerja sosial terhadap *hacker* juga perlu untuk diatur lebih lanjut mengingat sangat riskan apabila pelaku kejahatan siber dalam melakukan pidana kerja sosial tidak didampingi dan diawasi dengan baik karena dikhawatirkan residivis tindak pidana dapat terjadi Ketika pidana kerja sosial dilaksanakan.

Kata Kunci: Alternatif, Sanksi, Pidana Kerja Sosial, Hacker, Pidana Siber

ABSTRACT

Cybercrime has become a global issue in recent years, and hackers are one of the biggest cybersecurity threats. Many countries have implemented various criminal sanctions to fight cybercrime, including social work as an alternative punishment for hackers. This study aims to analyze and compare alternative social work criminal sanction policies against hackers in Indonesia, Singapore, and the UK. The research will focus on answering the problem regarding how is criminal law policy in the application of social work criminal sanctions against hackers as perpetrators of cybercrimes in Indonesia? and What is the ideal model of social work criminal sanctions in the future against hackers as perpetrators of cyber crimes in Indonesia (with a comparison in Singapore and the UK)? The methodology used in this research is normative juridical with a comparative analysis of legal documents and literature review. The study found that there is an opportunity for social work punishment to be applied against hackers in Indonesia by taking into account various judges' considerations and the objectives of sentencing, although there is no harmonization between these two arrangements. Research shows that Indonesia, Singapore, and the UK have different legal frameworks and practices in applying social work sanctions. The research found that the regulations and policies for social work punishment in Indonesia still have some deficiencies in terms of regulation when compared to social work punishment in Singapore and England. In addition, related to social work criminal sanctions against hackers, can be implemented. However, there is a need for further regulation regarding the mechanism of social work that will be carried out to achieve the goal of sentencing. In addition, supervision of social work crimes against hackers also needs to be further regulated considering that it is very risky if cybercriminals in carrying out social work crimes are not properly accompanied and supervised because it is feared that recidivism of criminal acts can occur when social work punishments are carried out.

Keywords: *Alternative, Sanctions, Community Service, Hacker, Cybercrime*